

PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA TASIKMALAYA

M. Ikrar Budijaya

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: * budijaya28@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks perkembangan kota-kota modern, termasuk di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah dalam perspektif kebijakan publik di Kota Tasikmalaya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menyelidiki kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian ini mencakup studi pustaka, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kampanye edukasi, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan permasalahan teknis dalam sistem pengelolaan sampah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bagian penting krusial dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sampah, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Kebijakan Publik, dan Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat, volume sampah perkotaan mengalami peningkatan signifikan. Pengelolaan sampah menjadi tantangan kritis bagi pemerintah dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Akumulasi sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, serta merugikan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan publik yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pihak swasta dan masyarakat sipil. Keterlibatan ini dapat menciptakan sinergi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Paradigma terhadap sampah mulai bergeser dari pandangan sebagai limbah yang harus dibuang ke pandangan sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Kebijakan publik perlu menyelaraskan perubahan ini untuk memaksimalkan potensi pengelolaan sampah sebagai sumber daya ekonomi.

Penanganan sampah di perkotaan seringkali menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Kurangnya tempat pembuangan akhir yang sesuai, fasilitas daur ulang, dan sistem pengangkutan sampah yang efisien bisa menjadi hambatan, serta minimnya kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah, pengelolaan limbah, dan pentingnya mendaur ulang dapat menghambat upaya penanganan sampah. Kampanye edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Disamping hal tersebut masih terdapat keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam pengelolaan sampah di banyak daerah, sehingga kebijakan publik perlu merumuskan strategi yang mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk memastikan keberlanjutan implementasi pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Penanganan sampah yang tidak benar dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, termasuk pencemaran air dan udara, serta merusak ekosistem, yang dapat masalah serius bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Setiap pemerintah daerah telah berusaha melakukan tindakan-tindakan dalam pengelolaan sampahnya melalui penerbitan berbagai kebijakan, termasuk di Kota Tasikmalaya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tasikmalaya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir. Istilah kebijakan sendiri menurut Federick (Agustino, 2008: 7) mendefinisikan: "Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu". Istilah kebijakan dapat juga dilihat sebagai seperangkat keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu".

Kebijakan publik yaitu jenis kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau masyarakat umum. Kebijakan publik biasanya dibuat untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan yang memengaruhi masyarakat secara luas. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan identifikasi masalah, pengembangan solusi, dan implementasi tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Kebijakan publik menurut Dye (Islamy, 2009: 19) menyatakan "*is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Chandler dan Plano (Tangkilisan, 2003: 1) menyatakan: "Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah". Kebijakan publik pada

umumnya dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi publik. Melalui sebuah kebijakan, permasalahan atau persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan. Dengan demikian, kebijakan merupakan rencana atau pedoman yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan kebijakan publik lebih spesifik mengacu pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memengaruhi kehidupan masyarakat secara umum.

Setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah perlu diimplementasikan dalam mencapai tujuannya. Menurut Edward III (1980) menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mentransformasikan kebijakan menjadi tindakan konkret atau hasil nyata". Kebijakan yang telah dibuat tanpa diimplementasikan hanyalah tumpukan dokumen semata. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan: "Implementasi kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas yang terjadi setelah kebijakan diadopsi, termasuk distribusi sumber daya, komunikasi, koordinasi, dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat".

Berkaitan dengan beberapa pendapat di atas menunjukkan pentingnya kebijakan dalam pengelolaan sampah di perkotaan yang mencerminkan upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan melindungi kesehatan serta keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Namun demikian dengan adanya kebijakan dalam bentuk peraturan tentang kebijakan dan strategi Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum dapat menyelesaikan permasalahan sampah secara efektif. Potensi timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas pada tahun 2023 mencapai 107.639 Ton/Tahun, dengan target pengurangan sampah sebesar 27%, sementara pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 107.983 Ton/Tahun dengan target pengurangan sampah sebesar 28%.

Dari hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja (Juriko, dkk. 2020). Hasil penelitian selanjutnya dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah yaitu diperlukan adanya sosialisasi Peraturan Daerah melalui media elektronik, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas kebersihan, pelatihan motivasi untuk pegawai serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan (Gusrini, dkk. 2015). Berdasarkan kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya hambatan-hambatan dan upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi risiko kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah yang tidak terkendali dapat menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai jenis patogen dan serangga penyebab penyakit, disamping dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan sampah. Daur ulang dan pengelolaan sampah yang

efisien dapat membantu mengurangi biaya transportasi, pemrosesan, dan pembuangan sampah. Dengan pengurangan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, beban dan kapasitas tempat pembuangan sampah dapat dikurangi, memperpanjang umur tempat pembuangan sampah dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Melalui pemahaman mendalam terhadap latar belakang ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik terkait pengelolaan sampah, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena atau kejadian tanpa melakukan manipulasi variabel. Metode penelitian deskriptif digunakan ketika peneliti ingin memahami atau menjelaskan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi pada suatu populasi atau sampel. Penggunaan metode deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan sampah dalam perspektif kebijakan publik di Kota Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang berada di Kp. Ciangir Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. TPAS Ciangir mulai beroperasi sejak Tahun 2002. Luas wilayah TPAS Ciangir yaitu sekitar 11 Ha. Lokasi TPAS Ciangir berjarak 12 km dari pusat Kota Tasikmalaya, dimana lokasi tersebut sudah memiliki sarana dan prasarana jalan hotmik dan jalan yang masuk dari gerbang masuk lokasi TPAS sudah bagus dengan menggunakan jalan beton. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Ciangir mampu menampung sampah dari wilayah Kota Tasikmalaya dengan daerah pelayanan mencakup 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Indihyang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Tawang, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Purbaratu.

Tugas dan tanggungjawab pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya diberikan kepada UPTD TPA Ciangir Kota Tasikmalaya. Fasilitas pendukung dalam pengelolaan sampah yang dimiliki terdiri dari mobil pengangkut sampah sebanyak 42 unit mobil yang terdiri dari 12 mobil Armroll, 27 mobil Dump Truck, 2 mobil Engkle Truck dan 1 mobil Pick Up. Sistem penimbangan ini menggunakan komputer dengan dioperasikan oleh operator timbangan. Fasilitas lainnya yaitu adanya tempat komposting, dimana tempat pengolahan sampah organik untuk dijadikan bahan pupuk melalui proses lanjutan.

Fasilitas penunjang selanjutnya yaitu Ruang Laboratorium, dimana ruang laboratorium ini digunakan untuk mengecek seberapa baik kah air yang dihasilkan dari kolam Leacheate, apakah sudah bisa dialirkan ke sungai dan tidak berbahaya

ataukah tidak. Tempat Pencucian Mobil, digunakan untuk mencuci mobil yang membuang sampah ke area TPAS Ciangir. Adapun dalam pengelolaan sampah memerlukan ketersediaan alat berat, dengan jenis kendaraan alat berat yang tersedia diantaranya, Eksavator, Bulldozer Komatsu dan Wheeloader. Telah tersedianya peralatan tersebut, sampah masih menjadi permasalahan di Kota Tasikmalaya, dimana tumpukan sampah menumpuk di beberapa tempat di wilayah Kota Tasikmalaya hingga di pinggiran jalan yang menimbulkan berbagai permasalahan, baik pencemaran air, tanah maupun udara yang menimbulkan bau busuk tidak sedap.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan permasalahan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya melibatkan berbagai faktor, diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat, dimana masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari perilaku pembuangan sampah sembarangan.
2. Infrastruktur yang tidak memadai, dengan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir yang sesuai, pengolahan sampah organik, atau fasilitas daur ulang. Disamping itu keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengangkut dan mengelola sampah dengan efektif.
3. Ketidakjelasan kebijakan dan tata kelola, dimana kebijakan yang kurang jelas atau tidak terkoordinasi dengan baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan sampah.
4. Kurangnya edukasi dan sosialisasi, hal tersebut ditandai dengan minimnya upaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara yang benar dalam membuang sampah dan pentingnya partisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah.
5. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil, dimana kurangnya keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung program pengelolaan sampah, serta keterbatasan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan solusi berkelanjutan.
6. Kondisi geografis dan lingkungan, dimana faktor-faktor seperti topografi dan kondisi geografis kota tasikmalaya dapat mempengaruhi efektivitas sistem pengelolaan sampah.
7. Kurangnya anggaran, dimana dengan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah, menghambat investasi dalam infrastruktur dan program pengelolaan sampah yang efektif.
8. Kurangnya monitoring dan evaluasi, dimana dengan keterbatasan dalam sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, sehingga sulit untuk mengidentifikasi permasalahan dan melakukan perbaikan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan infrastruktur,

perbaikan kebijakan, peningkatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pencapaian tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah bukan hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesehatan manusia, ekonomi, dan keseluruhan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah dapat membantu melindungi lingkungan dari dampak negatif sampah terhadap ekosistem alam, air, dan udara. Dengan efektif mengelola sampah, dapat mencegah polusi tanah, air, dan udara yang merugikan bagi keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.

Kegagalan dalam pengelolaan sampah dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan masyarakat. Dengan mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah, dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit yang disebabkan oleh limbah yang tidak terkendali dan mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah yang efisien membantu dalam konservasi sumber daya alam. Dengan mendaur ulang dan mengelola limbah secara bijak, dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas dan mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru. Dengan mencapai tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia, termasuk aspek-aspek seperti keamanan pangan, air bersih, dan udara bersih.

Sampah yang terurai dapat menghasilkan gas rumah kaca. Dengan mengelola sampah secara efektif, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Pencapaian tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mencapai tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang mengatur penanganan dan pembuangan sampah, yang dapat mencegah sanksi hukum dan mendukung tata kelola yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih kurangnya dukungan anggaran yang dibutuhkan, serta kebijakan berkaitan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya mencapai pengelolaan sampah yang efektif perlu menjalin kerjasama dengan sektor swasta, dan membutuhkan regulasi atau peraturan dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya secara jelas dalam menjalin kerjasamanya, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat bagi tercapainya tujuan dalam pengelolaan sampah secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Gusrini Yulistia, dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. <https://media.neliti.com/media/publications/96515-ID-implementasi-kebijakan-pengelolaan-sampa.pdf>

Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Juriko Abdussamad, dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/504>

Tangkilisan. 2003, Kebijakan dan Manajemen Publik, Jakarta: PT Grasindo.

Van Horn Carl & Van Meter Donal. 1975. Model-model dalam Kebijakan. Implementasi, Yogyakarta.